

RAPUR DUA RAPERDA DPRD KULONPROGO
Kinerja Perumda Air Minum dan Penambahan Modal

PENGASIH (KR) - DPRD Kabupaten Kulonprogo menerima penyampaian dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Pemkab setempat. Dua raperda tersebut Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun. Rapor terhadap penyampaian dua raperda digelar Kamis (22/2), di Ruang Kresna Gedung DPRD setempat. Pansus diantaranya meminta penjelasan terkait peningkatan kinerja apa yang ingin dicapai Perumda Air Minum Tirta Binangun dengan penambahan modal.

Agus Supriyanta juru bicara Pansus Raperda tentang Perubahan Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta Binangun, dalam pendapat awal Pansus selain mempertanyakan yang menjadi dasar segera adanya perubahan Atas Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 6 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun, juga terkait kinerja Perumda Air Minum Tirta Binangun yang telah di capai. "Bagaimana upaya untuk mengandeng investor dari pihak luar dan investor dari mana saja yang telah bekerja sama selama ini. Serta adakah inovasi strategi baru untuk bersaing dengan produk air minum dari perusahaan yang lebih besar,"



KR-Istimewa

Rapur penyampaian dua raperda.

ucap Agus .

Dikatakan Agus, penyer-taan modal adalah pengalih-an kepemilikan (kekayaan) yang semula tidak dipisah-kan menjadi kekayaan yang dipisahkan (sebagai modal Perumda Air Minum Tirta Binangun) dan berkaitan un-tuk aktivitas publik, sehingga prinsip akuntabilitas wajib di-jalankan. "Agar ada penje-lasan akuntabilitas yang ada di Perumda Air Minum Tirta Binangun.

Sedang Nasib Wardoyo SPD jubiir Pansus Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam pendapat awal pansus mempertanyakan latar be-lakang pembentukan dan apa dasar hukum pemben-tukan Raperda ini. "Apa saja perubahan susunan perang-kat daerah dalam Raperda ini dibandingkan kondisi ek-sisting saat ini? "Kami minta lampiran Raperbup yang mengatur mengenai susu-nan organisasi, fungsi dan tugas, serta tata kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Pe-rumahan dan Kawasan Per-mukiman, dan Dinas Ling-kungan Hidup. Serta kriteria

apakah yang digunakan un-tuk menentukan klasifikasi pada Badan Penanggulang-an Bencana Daerah (BPBD)," tutur Nasib Wardoyo.

Pj Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti Indrayanti ST MT dalam pengantar awal-nya menyatakan, dengan perkembangan kelemba-gaan di tingkat Pemerintah Pusat terdapat pengalihan beberapa urusan pemerin-tahan dari Pemerintah Pus-at, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabu-paten. Pengalihan urusan pemerintahan itu berdampak pada perubahan kelemba-gaan perangkat daerah dan beban urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sementara itu terkait pen-yertaan Modal Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar Perumda Air Minum Tirta Binangun yang diberikan dalam bentuk tu-nai. Selain bersumber dari APBD, juga bersumber dari program masyarakat ber-penghasilan rendah (Pro-gram MBR) yang merupa-kan program hibah. (Wid)

TANDA TANGANI PAKTA INTEGRITAS
Kemenag Gunungkidul Komitmen Wujudkan WBK



KR-Istimewa

Penandatanganan pakta integritas .

WONOSARI (KR) - Se-bagai bentuk komitmen mewujudkan Wilayah Be-bas dari Korupsi (WBK), jajaran pimpinan lingku-ngan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Gu-nungkidul menandatangani Pakta Integritas pada Rapat Kerja yang dise-lenggarakan di Karanga-nyar, Kamis (22/2). Salah satu isi Pakta integritas adalah mendukung dan berkontribusi menyiapkan satuan kerja Wilayah Be-bas dari Korupsi (WBK) dan atau Wilayah Biro-krasi Bersih dan Melayani (WBBM). " Rapat kerja

menjadi pemandu dalam melakukan pelayanan ke-pada masyarakat melalui unit atau satuan kerja ma-sing-masing," kata Kepa-la Kemenag Gunungkidul Drs H Saïban Nuroni MA, Jumat (23/2).

Secara simbolis Pakta Integritas ditandatangani Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi serta Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Kepala MAN 1 Gu-nungkidul, Kepala MTsN 1 Gunungkidul dan Ke-pala KUA Karangmojo. Pelaksanaan penandatnga-nan disaksikan Kepala Ke-menag Gunungkidul Drs

H Saïban Nuroni.

Diungkapkan, harapan-nya pelayanan kepada masyarakat di tahun 2024 ini lebih baik dari pada tahun 2023.

" Ini tentu saja sebagai sebuah rangkaian ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai rangkaian ibadah, harapannya Allah senantias memberikan bimbingan agar berjalan lancar, diberi kemudahan dan keberkahan, imbu-hnya.

Rapat kerja yang berta-juk "Transformasi Kemen-terian Agama Menuju In-donesia Emas 2045 digelar selama dua hari, Rabu (21/2) dan Kamis (23/2). H Saïban menambahkan, Penandatngan pakta in-tegritas ini sebagai komit-men untuk mewujudkan target. Sehingga mumpu-nyai tanggung jawab agar apa yang ditetapkan dapat terwujud. " Penandatnga-nan pakta integritas ini se-bagai komitmen yang ha-rus diwujudkan," jelasnya. (Ded)

PANEN PERDANA PADI DI UMBULREJO
Sampai Awal Maret Petani Panen 57,568 Ton

WONOSARI (KR) - Meski dihantui ancaman gagal panen, Dinas Pertan-ian dan Pangan Kabu-paten (DPP) Kabupaten Gununungkidul optimis produksi padi musim ta-nam I tahun 2023/2024 akan panen sesuai dengan harapan.

Dijelaskan, meski mu-sim tanam mundur dan hujan sebagian wilayah ti-dak sebagaimana biasa-nya, pada panen perdana di kelompok tani (Poktan) Rukun di Kalurahan Um-bulrejo, Kapanewon Pon-jong menghasilkan 6,8 ton gabah kering giling (GKG) tiap hektarenya. Sampai awal Maret nanti luas la-han yang panen mencapai sekitar 8.466 hektare.

"Dengan asumsi hasil panen di Umbulrejo sam-pai awal Maret produksi padi sebanyak 57,568 ton," kata Kepala Dinas Pertan-ian dan Pangan (DPP) Gunungkidul Rismiyadi SP MSi, Rabu (21/2). Lebih lanjutkan dikata-



KR-Endar Widodo

Rismiyadi SP MSi panen padi perdana di Umbulrejo, Kapanewon Ponjong.

kan Kepala DPP Gunung-kidul Rismiyadi, SP.MSi, panen perdana ini menun-jukan hasil yang cukup bagus di tengah musim yang kurang bersahabat atau tidak menentu. Pi-haknya mengapresiasi usaha para petani yang tetap bersemangat mena-nam padi.

Dijelaskan, total per-tanaman padi di Gunung-kidul pada musim tanam pertama baik di lahan sawah maupun lahan ke-ring mencapai 47.509 hek-tare dengan rincian tan-

am pada bulan Nopember 2023 seluas 9.412 hektare, tanam bulan Desember 2023 seluas 11.566 hek-tare dan tanam di Januari dengan padi bantuan pe-merintah mencapai 2.000 hektare dan sisanya swa-daya.

Pada akhir Febuari ini diharapkan ada panen pa-di lebih dari 8.466 hektare lahan. Hal senada dikata-kan Danang Sutopo SHuT sub koordinator substansi produksi tanam-an pangan DPP Gunung-kidul. (Ewi)

POLRES GUNUNGKIDUL ANCAM PENIMBUN

Terjadi Kelangkaan Beras

WONOSAR (KR) - Kapolres Gunungkdiul AKBP Edy Bagus Sumantri SIK mengakui be-berapa waktu terakhir terjadi kelangkaan per-sediaan beras di masyarakat. Dampaknya terja-di kenaikan harga beras hampir seluruh wilayah.

Pihaknya sudah melaku-kan koordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga terse-but. Selain itu Kapolres sudah meminta Bagian Reskrim untuk melaku-kan pencermatan ke-mungkinan terjadinya pe-nimbunan barang. " Polres mengajak meda massa un-tuk bersama-sama mence-gah terjadinya penimbun-an beras," kata Kapolres Gunungkidul AKBP Eddy Bagus Sumatri SIK MH dalam Jumat Curhat be-rsama Wartawan Paguy-uban Wisanggeni di ru-mah makan (RM) Layah

Kembar Wonosari, Jumat (23/2).

Tidak hanya kepolisian dan pemerintah, masyara-kat juga diminta menyam-paikan informasi jika me-nemukan penimbunan be-ras. Sementara ketertiban masyarakat pascapemu-ngutan suara pemilu ta-hun 2024 cukup aman dan tertib.

12 PPK

Sekarang ini pada tahap rekapitulasi suara pemilu di tingkat Pantia Pemil-ikan Kapanewon (PPK). Sudah da 12 PPK yang men yelesaikan rekapitu-lasi, sedang 8 PPK Jumat (23/2) siang mengadakan



KR-Endar Widodo

Kapolres Gunungkidul AKBP Eddy Bagus Sumatri SIK MH di acara Jumat Curhat.

rapat pleno penetapan hasil perhitungan suara. Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kapanewon juga berjalan lancar dan ting-gal melanjutkan di KPU Gunungkidul.

Dalam kesempatan ter-pisah, Kepala Dinas Perda-gangan Kabupaten Gu-nungkidul Kelik Yunianto-ro SSos MM mengungkap-kan, pihaknya sudah melau-kan Operasi Pasar (OP) beras Stabilitas Pangan dan Harga Pangan (SPHP) ker-

ja sama dengan Badan Usa-ha Logistik (Bulog) DIY. Ta-hap pertama melakukan operasi di Pasar Argosari, Kapanewon Wonosari un-tuk 24 pedagang sebanyak 9 ton. Operasi ini akan ber-lanjut ke pasar lain, seperti pasar Playen, Ponjong, Ka-rangmojo, Semanu, Semin, Ngawen, Trowono dan Ngli-par. Operasi pasar sudah mulai tanggal 16 Februari lalu, dijual kepada para pedagang di pasar-pasar. (Ewi/Ded/Bmp)

DITELUSURI DINAS PENDIDIKAN

Pelajar SMP Korban Perundungan, Diselesaikan Damai

WONOSARI (KR) - Kasus perun-dungan di lingkungan sekolah kem-bali terjadi di Kabupaten Gunung-kidul dan telah dilaporkan Dinas Pendidikan. Dugaan perundngan tersebut menimpa seorang siswa dis-abilitas di salah satu siswa kelas VII sebuah SMP Negeri di Kapanewon Wonosari. Akibat perundungan itu, korban bernama Rofiq mengalami patah tulang salah satu jarinya. Saat ini, korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari dan akan segera menjalani operasi.

"Dugaan kasus perundungan ini su-dah dilaporkan dinas dan kami tengah menelusuri kebenaran dari kasus ini," kata Kadinas Pendidikan Nunuk Setyowati MM Jumat (23/2).

Menurut Nunuk Setyawati penelu-sur-an untuk mencari kebenaran ka-

sus ini masih perlu ditelusuri. Bahkan pihaknya menyatakan bahwa kasus tersebut belum tentu termasuk kate-gori kasus perundungan. Jadi dalam hal ini masih perlu ditelusuri dan di-dalami.Berdasarkan informasi yang ia terima bahwa Rofiq yang memiliki keterbatasan fisik yang justru berin-isiatif memukul temannya berinisial Rah lebih dulu. Pukulan itu men-garah ke Rah dan meleset menghantam benda keras sehingga menyebabkan jari kelingkingnya patah. "Tetapi apapun kejadiannya kami tetap skan melakukan penanganan dan pendampingan," ujarnya.

Terpisah orangtua Rofiq bernama Wasido mengatakan, sejak lahir, anaknya yang duduk di bangku kelas VII SMP ini memang berbeda dengan teman-temannya karena ia terlahir disabilitas. Tangannya hanya satu.

Perbedaan inilah yang membuat Rofiq seringkali mendapatkan perlakuan tidak pantas dari teman-temannya. Sebelum kejadian usai dzuhur, anak-nya mendapatkan perlakuan yang dinilai sangat tercela dari teman-te-mannya. "Anak saya kan cacat sejak lahir diejek temennya itu hingga akhirnya terjadi perlawanan dan berkelahi, tetapi untuk pastinya bagai-mana saya belum tahu," ucap Wasido.

Sementara ditengah kasusnya di-tangani Dinas pendidikan kedua orangtua Rofiq dan Rah membuat surat pernyataan damai. Keduanya sepakat untuk tidak melanjutkan kasus ke ranah hukum. Pihak orangtua Rah juga bersedia untuk membantu membiayai pengobatan dan keduanya bersedia intuk saling memaafkan. (Bmp)

PENJABAT BUPATI MUTASI 5 KEPALA OPD

Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Pelayanan Publik

WATES (KR) - Optim-alisasi pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pe-layanan publik, Pj. Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti Indrayanti MT merotasi sejumlah kepala organisasi perangkat da-erah (OPD).

Pelantikan dan pengam-bilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo di Aula Adhikarta Gedung Kaca, Jumat (23/2).

Nampak hadir menyak-sikan pelantikan dan pe-ngambilan sumpah, Sekda Kulonprogo Triyono SIP, Kepala Badan Perenca-naan Pembangunan Dae-rah (Bappeda) Ir Muh Aris Nugroho, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) se-

tempat, Sudarmanto SIP MSi, dan unsur For-kompimda.

Lima pejabat yang di-lantik, Arif Prastowo SSos sebagai Inspektur Daerah, Drs Nur Wahyudi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga, Bambang Sutrisno SSos sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Trans-migrasi, Drs Eka Pranyata sebagai Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) dan Drs Ariadi MM sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

"Dengan pengalaman yang cukup banyak dalam tata kelola pemerintahan, masing-masing pejabat saya harap mampu men-jalankan tugasnya dengan baik. Kita tahu masing-masing pejabat tinggi pra-tama punya wawasan luas



KR-Asrul Sani

Pj Bupati Ni Made Dwipanti Indrayanti menyerah-kan SK mutasi pada Kepala Dishub yang baru Drs Ariyadi.

dalam menangani masa-lah-masalah yang muncul dalam pekerjaannya. Saya berpesan bahwa jabatan adalah amanah maka ker-jakan setiap tanggung-jawab dengan ketulusan dan keikhlasan," kata Ni Made dalam amanatnya. Ni Made juga berpesan

selain menjadi pimpinan yang kompeten, diharap-kan juga menjadi pimpin-an yang mampu mengayo-mi para pegawai di bawah-nya. Karena tanpa mere-ka, pekerjaan kita tidak akan dapat berjalan de-ngan baik. (Rul)

Pemkab Dorong Percepatan Reformasi Kalurahan

WATES (KR) - Dalam upaya peningkatan kualitas Pemerintahan Kalurahan maka Pemerintah Kabu-paten (Pemkab) Kulonprogo dorong percepatan refor-masi kalurahan. Mengawali langkah tersebut Dinas PMD Daldud dan KB men-ggelar Rakor Tim Pelak-sana Reformasi Kalurahan Pemkab Kulonprogo 2023-2024, di Field Research Center (FRC) UGM, Pedu-kuhan Tunjungan, Kalura-han/Kapanewon Pengasih, Kamis (22/2).

Sasaran Program Refo-rmasi Kalurahan, tercipta-nya tata kelola Pemerintah Kalurahan yang efektif, ko-laboratif dan berorientasi kinerja serta terciptanya budaya pemerintahan de-ngan pamong Kalurahan yang profesional. Kedua sasaran tersebut akan dica-pai dengan dua kegiatan, di-antaranya Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kine-



KR-Asrul Sani

Ni Made Dwipanti Indrayanti MT memimpin Rakor Tim Pelaksana Reformasi Kalurahan Pemkab Kulonprogo 2023-2024.

rja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemerintah Kalura-han, penguatan Pengelo-laan Keuangan Pemerintah Kalurahan, Penguatan Pe-ngawasan oleh Masyarakat dan Bamuskal dan Pela-kanaan Pelayanan Publik Prima.

Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti Indrayanti MT sekaligus Ketua Tim Pelaksana Re-formasi Kalurahan Pemkab Kulonprogo menegaskan,

reformasi birokrasi DIY saat ini sudah mencapai level A, sedangkan SAKIP sudah mencapai level AA. Pencapaian tersebut di-harapkan tidak hanya pada level pemerintah daerah sa-jaja tapi hingga Kalurahan di DIY.

"Dengan dilakukannya reformasi kepada para perangkatnya maka juga harus dilakukan reformasi terhadap pemberdayaan masyarakatnya, supaya

program dan kegiatannya betul-betul memberikan dampak yang baik bagi pe-layanan publik, baik pem-bangunan fisik maupun non fisik," kata Ni Made saat membuka rakor.

Reformasi kalurahan ber-tujuan memperbaiki admi-nistrasi dan pemerintahan di tingkat kalurahan pada aspek perbaikan tata kelola pemerintahan, agar lebih terbuka dan bisa di akses sepenuhnya oleh masyara-kat. Program yang di-jalankan juga menyasar dan mencoba mengatas-persoalan utama kalurahan di sektor hulu. Seperti soal akuntabilitas kinerja dan keuangan, kondisi SDM, tata nilai dan regulasi.

"Kondisi tersebut harus direformasi dan ketika su-dah ada tata kelola yang baik maka bisa meningkat-kan hidup dan penghidupan masyarakat," tegas Ni Made. (Rul)